



Beli Pertalite Harus Punya Kode QR

CARA DAFTAR PERTALITE DAN SOLAR BERSUBSIDI PAKAI MYPERTAMINA

Beli BBM bersubsidi hanya bakal bisa dilakukan melalui sistem MyPertamina, dimulai bertahap 1 Juli 2022. Aturan main ini khusus untuk pemilik kendaraan roda empat. Untuk uji coba akan dimulai di 11 wilayah termasuk di DIY. Begini cara mendaftarnya:

1. Pemilik kendaraan roda empat menyiapkan KTP, STNK, foto Kendaraan & dokumen pendukung lainnya
2. Buka website: subsidiempat.mypertamina.id
3. Centang informasi memahami persyaratan
4. Klik "Daftar Sekarang"
5. Ikuti instruksi di website
6. Tunggu pencocokan data maksimal 7 hari kerja di alamat email yang telah didaftarkan; atau cek "Status Pendaftaran" di website secara berkala
7. Apabila sudah terkonfirmasi, pengguna akan mendapat QR Code atau Kode QR untuk pembelian BBM bersubsidi pertalite dan solar
8. Unduh/download Kode QR dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina

CARA 1

Dengan Ponsel Pintar:
Kode QR melalui aplikasi MyPertamina



CARA 2

Tanpa ponsel pintar:
Print Kode QR di Kertas dan tunjukkan saat membeli Pertalite/ Solar bersubsidi.



JOGJA-Pertamina Patra Niaga mengumumkan pembelian BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi dengan konsumen berkendara roda empat ke atas, harus sudah terdaftar di laman **MyPertamina** dan telah memiliki Kode QR mulai 1 Juli 2022.

Yosef Leon Pinsker
yosef@harianjogja.com

Kota Jogja menjadi satu dari 11 kabupaten/kota yang akan diuji coba penerapan kebijakan baru ini. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DIY menilai sosialisasi mengenai kebijakan anyar dari Pertamina ini harus optimal. Pemerintah mesti turut mengoptimalkan sosialisasi ke masyarakat soal penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian pertalite.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution,

► Masyarakat tak perlu cemas apabila tidak memiliki aplikasi MyPertamina, karena pendaftaran bisa dilakukan di situs.

► Kriteria mobil jenis apa yang bisa membeli Pertalite belum ditentukan.

menjelaskan tata cara pembelian dengan mendaftar di **MyPertamina** ini diterapkan agar subsidi bahan bakar yang diberikan Pemerintah bisa tepat sasaran.

Menurutnya, Pertamina yang menjual Pertalite dan Solar harus patuh, tepat sasaran, dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM yang disubsidi pemerintah. Untuk menyalurkan BBM subsidi juga terdapat aturan, mencakup sisi kuota maupun jumlah, dan dari sisi segmentasi penggunaannya.

Alfian Nasution menjelaskan yang terpenting adalah memastikan menjadi pengguna terdaftar pada situs **MyPertamina**.

► Halaman 10

11 WILAYAH PENDAFTARAN TAHAP I (DIMULAI 1 JULI 2022)

- Kota Bukittinggi, Sumatra Barat
- Kota Padang Panjang, Sumatra Barat
- Kabupaten Agam, Sumatra Barat
- Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat
- Kota Bandung, Jawa Barat
- Kota Tasimalaya, Jawa Barat
- Kota Sukabumi, Jawa Barat
- Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
- Kota Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- Kota Manado, Sulawesi Utara

Sumber: Bsisnis.com



Graffis: Harian Jogja/Sunu Jatmiko

Beli Peralite...

Pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan.

Pengguna terdaftar akan mendapatkan Kode QR khusus yang menunjukkan bahwa data mereka cocok, dan dapat membeli Peralite dan Solar bersubsidi. Menurutnya, jika seluruh data sudah cocok maka konsumen baru bisa bertransaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital.

"Inilah yang kami harapkan, Pertamina dapat mengenali siapa saja konsumen Peralite dan Solar. Sehingga ke depan, bisa menjadi acuan dalam membuat program ataupun kebijakan terkait subsidi energi bersama pemerintah sekaligus melindungi masyarakat yang saat ini berhak menikmati bahan bakar bersubsidi," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (28/6).

Saat ini Pertamina Patra Niaga memperkuat infrastruktur serta kesisteman untuk mendukung program penyaluran Peralite dan Solar secara tepat sasaran ini. Direncanakan, uji coba awal mulai 1 Juli lusa, akan dilakukan di 11 kota/kabupaten yang tersebar di lima provinsi, salah satunya DIY. (*lihat grafis*)

Tak Perlu Cemas

Masyarakat tidak perlu cemas apabila tidak memiliki aplikasi *MyPertamina*. Sebab pendaftaran bisa dilakukan di situs web *MyPertamina* yakni di: <https://subsidi.cepat.mypertamina.id/>.

Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Peralite dan Solar bebas mendaftarkan data diri melalui *website* ini, dan menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. (*lihat grafis*).

Menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, kata Alfian, merupakan salah satu amanat yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Sebagai BBM bersubsidi, penyaluran Solar dan Peralite penugasan ini diatur oleh regulasi, antara lain Perpres No. 191/2014 dan Surat Keputusan BPH Migas No. 4/2020.

"Dalam menyalurkan BBM subsidi ada aturannya, baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari sisi segmentasi

penggunanya. Saat ini, segmen pengguna Solar subsidi ini sudah diatur, sedangkan Peralite segmentasi penggunaannya masih terlalu luas," kata Alfian.

Saat ini, dalam praktik penjualan di lapangan, sering terjadi adanya konsumen yang tidak berhak mengonsumsi Peralite dan Solar. Dan jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan mencukupi.

Belum Ada Kriteria

Di tengah rencana yang tinggal diimplementasikan uji cobanya oleh Pertamina dua hari lagi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masih menyusun kriteria mobil yang bisa membeli Peralite.

Sejauh ini Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan pemilik mobil mewah dengan CC besar yang bakal dilarang beli Peralite. Namun, hingga tadi malam, belum ada rincian lebih jelas berapa besar CC yang dimaksud. BPH Migas menganggotai Universitas Gadjah Mada untuk melakukan kajian terkait CC tersebut. "Memang banyak perdebatan dan kami sampai pada kesimpulan akan ditetapkan pada CC-nya. Kenapa? Kami melihat [jika] CC-nya besar maka akan mengonsumsi BBM [lebih banyak]," ungkap Erika dikutip *detik.com*.

Menurut Erika, spesifikasi mesin mobil ber-CC besar dirancang untuk tidak konsumsi Peralite, dan bahkan jika nekat mengonsumsi akan merusak mesin juga.

Dia mengatakan BPH Migas menargetkan pembatasan secara penuh itu dimulai Agustus atau paling lambat September. "Tapi tentu saja kewenangan itu bukan di kami karena itu [harus melalui] perpres," kata Erika.

Menurut Erika, poin-poin usulan untuk merevisi Perpres tersebut telah disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Presiden Joko Widodo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan harga keekonomian Peralite dan Pertamax sudah mencapai Rp30.000 per liter, bahkan lebih. Tingginya harga BBM ini seiring dengan kenaikan harga minyak dunia. "Sekarang ini harga minyak dunia sudah di atas US\$ 100 sampai US\$ 120 per barel," kata Arifin,

Senin (27/6).

Saat ini, Pertamina masih menjual Peralite atau RON 90 di angka Rp7.650, sedangkan Pertamax dijual Rp12.500 per liter. Angka tersebut, kata Arifin, sangat jauh dari harga keekonomian BBM.

Angka keekonomian BBM lebih besar dari data Kementerian ESDM sebelumnya. Data Kementerian ESDM menunjukkan harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 per April 2022 naik menjadi Rp16.000 per liter. Sedangkan sebelumnya, harga keekonomian BBM tersebut sebesar Rp14.526 per liter.

Arifin menyebut pemerintah harus mengantisipasi gap harga lantaran situasi krisis energi tidak bisa diramalkan selesai tahun ini atau lebih lama lagi. "Makanya, kita perlu mengingatkan ke masyarakat agar menggunakan BBM seefisien mungkin. Ini berdampak pada [membengkaknya] alokasi subsidi," kata dia.

Masih Bingung

"Pelaksanaannya kapan kan harus ada sosialisasi juga kepada masyarakat. Mereka kan pengguna. Konsumen... Kami juga masih bingung bagaimana teknisnya," kata Ketua Dewan Pertimbangan Hiswana Migas DIY Siswanto, Selasa.

Hiswana Migas DIY belum mengetahui apakah kebijakan pembatasan ini bakal berdampak pada penurunan konsumsi pertalite atau tidak. "Konsumsi pertalite ya masih tinggi karena disparitas harganya dengan yang lain. Apalagi sejak kenaikan pertamax itu konsumsi pertalite sampai dua kali lipat dan pertamax berkurang pembeliannya," imbuhnya.

Menurutnya, masyarakat sudah lama terkena kebijakan subsidi bahan bakar minyak sejak Orde Baru la juga mengusulkan agar pertalite dihapus atau dinaikkan saja harganya untuk mengurangi beban keuangan negara. Hanya saja keberhasilan kebijakan ini ke depan akan bergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

"Ya bagaimana pemerintah menyosialisasikan program ini di samping kita juga sebagai ujung tombak yang melaksanakan program ini dan masyarakat juga harus diinformasikan agar supaya nanti tidak kaget," jelas Siswanto. (*Anitana Widya Puspa/Bisnis.com, detik.com*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005